

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PENGESAHAN DEKAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian	12
E. Kerangka Pemikiran.....	13
F. Metode Penelitian	29
1. Spesifikasi Penelitian	29
2. Metode Pendekatan	30
3. Tahap Penelitian.....	31
4. Teknik Pengumpul Data	33
5. Alat Pengumpul Data	34
6. Analisis Data	35
7. Lokasi Penelitian.....	36

8. Jadwal Penelitian	37
9. Road Map Penelitian.....	39

BAB II PENGERTIAN TINDAK PIDANA, PEMIDANAAN, TINDAK PIDANA KORUPSI, DISPARITAS PUTUSAN HAKIM, PEDOMAN PEMIDANAAN, KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM (KEPPH) DAN PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME

A. Tindak Pidana	40
1. Pengertian Tindak Pidana	40
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	45
3. Jenis-Jenis Sanksi Pidana.....	48
4. Penyertaan (<i>Deelneming</i>).....	52
5. Perbuatan Berlanjut (<i>Voortgezette Handeling</i>).....	60
B. Pidana	62
1. Pengertian Pidana	62
2. Maksud dan Tujuan Pidana	64
3. Teori Pidana	71
C. Tindak Pidana Korupsi	81
1. Pengertian Tindak Pidana korupsi	81
2. Unsur Tindak Pidana Korupsi.....	92
3. Pembayaran Uang Pengganti	101
D. Disparitas Putusan Hakim.....	105
E. Pedoman Pidana (<i>Straftoemetingsleidraad, atau Statutory Guidelines for Sentencing</i>).....	115
F. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).....	122
G. Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme	127

**BAB III PUTUSAN PENGADILAN TENTANG DISPARITAS PEMIDANAAN
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN SOSIAL**

A. Kasus Posisi	132
1. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/TP Korupsi/2013/PN.PTK.....	133
2. Putusan Nomor 04/Pid.Sus/TP Korupsi/2015/PN.PTK.....	137
3. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2012/PN.BDG.....	140
4. Putusan Nomor 51/Pid.Sus/TPK/2012/PN.BDG.....	148
5. Putusan Nomor 112/Pid.Sus/TPK/2015/PN.BDG.....	158
B. Hasil Wawancara dengan Hakim.....	161

**BAB IV ANALISIS TENTANG DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN SOSIAL**

A. Komparasi Putusan yang Mengandung Disparitas Pidana.....	172
B. Faktor Penyebab Disparitas Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial	184
C. Upaya Mahkamah Agung dalam Mengatasi Disparitas Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial.....	222

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	234
B. Saran	238

DAFTAR PUSTAKA	242
-----------------------------	------------

LAMPIRAN